

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2024.

Semarang,

**KEPALA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**SLAMET, AK**

Pembina Tingkat I

NIP.19660215 198603 1 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Masa Jabatan Gubernur Jawa Tengah akan selesai pada Tahun 2023 bersamaan dengan selesainya pula Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Penetapan kebijakan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional baru dilaksanakan pada Tahun 2024 akan berdampak pada kekosongan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tidak dapat berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Sebagai dasar pelaksanaan pembangunan Tahun 2024-2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 atau RPD Tahun 2024-2026. Hal tersebut merupakan amanah dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB). Selain itu seluruh perangkat daerah juga harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026. Dokumen RPD Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah atau perkara kemudian akan menjadi pedoman bagi Pj. Gubernur Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024-2026. Dokumen RPD Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman penyusunan RKPD periode yang sama, demikian pula dengan Renstra PD akan menjadi pedoman penyusunan Renja PD.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Tahunan yang oleh organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai tindak lanjut RKPD yang didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing OPD Tahun 2024 yang mendasarkan pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Surat Edaran Nomor: 050.23/0000031 tentang Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan, Serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu perangkat daerah yang ditugaskan mengelola keuangan dan aset daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah juga memiliki kewajiban menyusun rencana kerja daerah. Rencana Kerja BPKAD Provinsi Jawa Tengah merupakan rencana kerja selama 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk lebih memfokuskan perencanaan kegiatan sesuai dengan perkembangan dan mencapai tujuan organisasi sebagaimana akan ditetapkan dalam target kinerja SKPD.

Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang pengelolaan keuangan daerah. Renja BPKAD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah yang sifatnya lebih operasional dan menjadi salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Selain itu, dalam pelaksanaan Renja BPKAD nantinya pada Tahun berjalan, akan menjadi acuan dalam melakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui capaian kinerja BPKAD yang akan dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjIP).

## **1.2 Proses Penyusunan**

Penyusunan Renja BPKAD Tahun 2024 dilakukan dengan mendasarkan pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Jawa Tengah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 2 Tahun sebelumnya, serta dinamika permasalahan yang

dihadapi. Dalam menyusun Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya dalam rangka pencapaian sasaran dan target pada Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Sinergitas dan penyesuaian kebijakan penganggaran yang telah ditentukan berdasarkan target kinerja pada RKPD Tahun 2024 harus sinkron dan konsisten dengan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Platform Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Rancangan Renja BPKAD Perangkat Daerah (PD) mengacu pada rumusan kerangka awal RKPD, untuk itu penyusunannya dilakukan secara simultan dan paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan kajian terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan RenjaPD Tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja pencapaian RenstraPD, selanjutnya RenjaPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPKAD dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan, meliputi:
  - 1) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja PD;
  - 2) orientasi mengenai Renja PD;
  - 3) penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja PD; dan
  - 4) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.
- b. Penyusunan rancangan awal, Ranwal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi Renja PD Tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja

PD Tahun berjalan, Ranwal Renja PD mencakup analisis gambaran pelayanan PD dan hasil evaluasi Renja PD Tahun lalu. Hasil perumusan rancangan awal Renja PD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- 1) pendahuluan;
  - 2) hasil evaluasi Renja PD Tahun lalu;
  - 3) tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
  - 4) rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - 5) penutup.
- c. Penyusunan rancangan merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD yang mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan;
- e. Lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja PD;
- f. Perumusan rancangan akhir merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD;
- g. Penetapan.

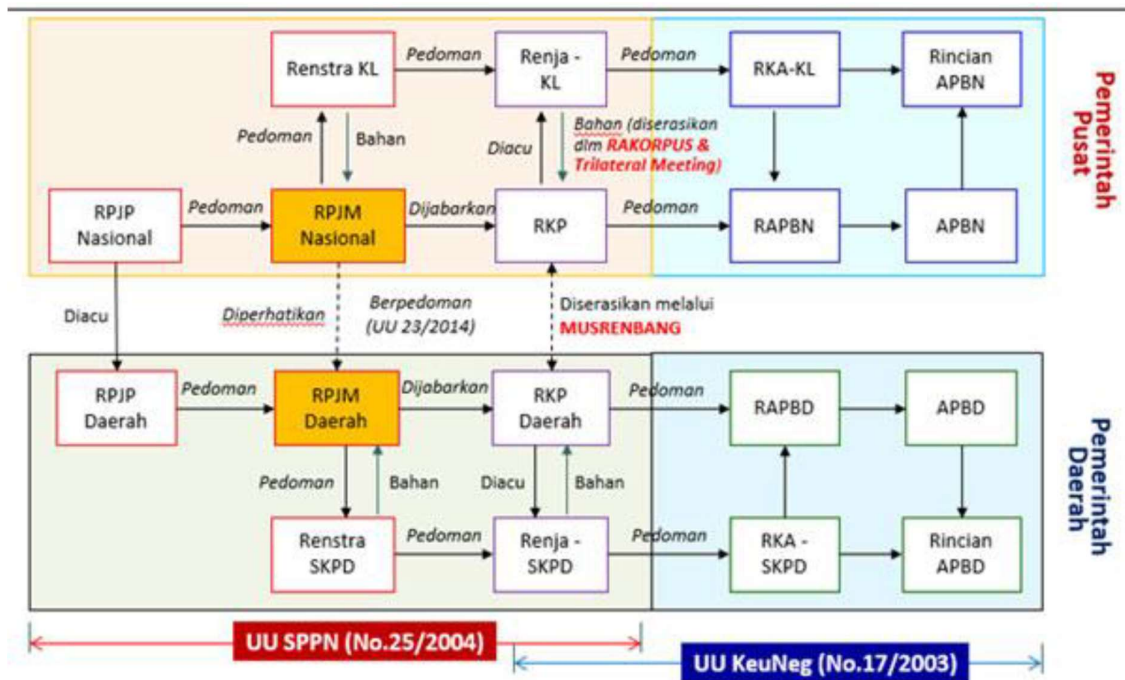
### **1.3 Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Renja BPKAD sebagai dokumen perencanaan Tahunan yang didasarkan pada penjabaran rencana pembangunan jangka waktu lima Tahunan. Untuk itu, diperlukan keterpaduan dan keterkaitan antaradokumen perencanaan dan penganggaran dalam rangka mewujudkan sistem perencanaan yang terpadu dan sistematis, sehingga seluruh dokumen-dokumen perencanaan yang disusun haruslah ada keterkaitan satu sama lain.

## 1.4 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja

GAMBAR1.1

KETERKAITAN HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN SESUAI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Dasar Hukum Penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
23. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
24. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
25. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Maksud Penyusunan Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah untuk

kurun waktu 1 (satu) Tahun dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- c. Mempermudah pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan berkaitan dengan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- d. Menjamin adanya sinergitas, konsistensi, keterkaitan dan keserasian antara dokumen perencanaan dan penganggaran dalam lingkup BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Sedangkan tujuannya penyusunan Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai upaya mewujudkan perencanaan dan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah yang tertib, efektif, efisien, terukur dan konsisten.
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan pencapaian visi misi dan tujuan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah;
- c. Menjadi pedoman dalam pencapaian sasaran pembangunan dan tolok ukur dalam mengukur serta mengevaluasi Kinerja pegawai dalam lingkup BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja OPD adalah menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD dan susunan garis besar isi dokumen Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Reviw Terhadap Rancangan

Awal RKPD dan Penalihan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi uraian ringkas tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, dan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi tentang penjelasan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatif untuk Tahun 2023 dan perkiraan maju Tahun 2024.

**BAB V PENUTUP**

Berisi tentang catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Renja Perubahan BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dalam Pelaksanaan Urusan Penunjang Keuangan dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah**

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan</b>									
	<b>Urusan Keuangan</b>									
	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	1. Persentase Evaluasi APBD kabupaten/kota yang tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan	%		100	99,05	99,05	100	100	100
		2. Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu	%		100	100	100	100	100	100
		3. Persentase Penetapan APBD tepat waktu	%		100	100	100	100	100	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4. Persentase penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu	%		100	100	100	100	100	100
		5. Persentase realisasi serapan APBD	%		92	98,65	107,23	95	95	100
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	Jumlah OPD yang Menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan	OPD		41	41	100	41	41	100
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	Dok		105	104	99,05	105	105	100
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan perundangan	OPD		41	41	100	41	41	100
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1. Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara memadai	OPD		44	44	100	44	44	100
		2. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan	Dok		3	3	100	3	3	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Laporan Keuangan Pemerintah Daerah								
		3. Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah	Lap		5	5	100	3	3	100
		4. Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dok		1	1	100	1	1	100
		5. Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	OPD		7	7	100	7	7	100
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang diproses Pencairan	OPD		41	41	100	41	41	100
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen belanja transfer Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Dok		1	1	100	1	1	100
	<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah	%		70	77,20	110,29	72,50	72,50	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan	Unit		60	60	100	62	62	100	
		2. Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun	Dok		41	41	100	41	41	100	
		3. Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dok		42	42	100	42	42	100	
		4. Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah	Dok		4	4	100	4	4	100	
		5. Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah	Unit		177	401	226,55	233	233	100	
	<b>NON URUSAN</b>										
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	1. Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%			75	100	133,33	100	100	100
		2. Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%			73,50	73,50	100	100	100	100
		3. Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%			75	100	133,33	80	80	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dok		6	6	100	10	10	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dok		7	7	100	4	4	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dok		2	4	200	1	1	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dok		2	2	100	1	1	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dok		2	2	100	2	2	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dok		1	1	100	2	2	100
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dok		-	-	-	1	1	100

Berdasarkan tabel 2.1 hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 dan perkiraan capaian Tahun 2023 mengacu pada APBD Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program/kegiatan BPKAD Tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang tingkat realisasinya 99,05%. Hal ini disebabkan keterlambatan pengajuan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 oleh Pemerintah Kabupaten Tegal akibat Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dan DPRD Kabupaten Tegal yang tidak tercapai tepat waktu.

Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 5 indikator kinerja, terdapat 3 indikator kinerja yang memenuhi target kinerja tahun anggaran 2022 yaitu: Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu; Persentase Penetapan APBD tepat waktu; dan Persentase penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu. Demikian pula untuk Kegiatan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat 5 (lima) Kegiatan yang telah memenuhi target yang ditetapkan, yaitu: Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran; Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah; dan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Keberhasilan tersebut karena program/kegiatan dilaksanakan melalui kerjasama, komunikasi dan koordinasi antar pihak serta didukung dengan penggunaan teknologi informasi yang baik.

Untuk indikator kinerja program yang telah melebihi target adalah Persentase realisasi serapan APBD, dimana serapan APBD terbesar pada Triwulan IV tahun anggaran berkenaan yang didorong dengan penerbitan Surat Edaran Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang percepatan APBD Tahun Anggaran 2022.

Terhadap target capaian program Renstra PD, BPKAD optimis dapat memenuhi target program/kegiatan pada program pengelolaan keuangan daerah dengan lebih meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pihak terkait program pengelolaan keuangan daerah.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah telah melebihi target yang telah ditetapkan, sedangkan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai 4 (empat) indikator kinerja yang telah memenuhi target yaitu: Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan; Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun; Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Jumlah Dokumen *updating* data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah; dan 1 (satu) indikator kinerja yang melebihi target yaitu Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah.

Faktor pendukung tercapainya target indikator kinerja tersebut adalah inventarisasi, *updating* data barang milik daerah, dan promosi yang dilakukan BPKAD sehingga jumlah barang milik daerah yang berhasil diamankan tercapai dua kali lipat dan barang milik daerah yang direncanakan dapat dimanfaatkan pada tahun anggaran 2022 dapat dimanfaatkan seluruhnya. Terlebih lagi, pada tahun anggaran 2023 BPKAD akan melaksanakan sensus barang milik daerah sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat lebih mendukung tingkat capaian realisasi target program pengelolaan barang milik daerah pada Renstra PD.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pada indikator kinerja program tersebut, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang melebihi target yang telah direncanakan, yaitu Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah dan Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah; dan 1 (satu) indikator kinerja yang memenuhi target yaitu Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD.

Sedangkan 4 (empat) Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi telah memenuhi target dan 1 (satu) Kegiatan yang telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Keberhasilan tersebut tercapai karena program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan setiap bulan dan semua dokumen yang ditargetkan telah disusun.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan BPKAD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Indikator Kinerja pada urusan Penunjang bidang Keuangan digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi Capaian Tahun 2023	Catatan Analisis
				2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Evaluasi APBD kabupaten/kota yang tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan			100%	100%	99,05%	100%	
2	Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu			n.a	100%	100%	100%	
3	Persentase Penetapan APBD tepat waktu			100%	100%	100%	100%	
4	Persentase penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu			100%	100%	100%	100%	
5	Persentase realisasi serapan APBD			92%	95%	98,65%	100%	
6	Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan			60 Unit	62 Unit	60 Unit	62 Unit	
7	Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun			41 Dok	41 Dok	41 Dok	41 Dok	
8	Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			42 Dok	42 Dok	42 Dok	42 Dok	
9	Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah			4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	
10	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah			177 Unit	233 Unit	401 Unit	233 Unit	

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebagai Perangkat Daerah memiliki fungsi strategis karena mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam mewujudkan tercapainya fungsi strategis dimaksud, BPKAD Provinsi Jawa Tengah terkait langsung dengan pelaksanaan misi ke 2 (dua) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu: Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga perlu ditindaklanjuti dengan penyiapan aparatur yang berkompeten, berdedikasi tinggi, dan menjunjung tinggi nilai integritas. Disamping hal tersebut, perlu dipersiapkan pula sarana dan prasarana penunjang pemerintah serta mendapatkan jaminan perlindungan dalam rangka pelaksanaan program kerja pemerintah daerah.

Mengacu pada dokumen Renstra PD, BPKAD melaksanakan fungsi pelayanan administrasi keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Kabupaten/Kota dan *stakeholder*. Dalam melaksanakan fungsi pelayanan administrasi keuangan, berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan jenis pelayanan administrasi keuangan, antara lain: a) Pelayanan perbendaharaan di bidang pencairan anggaran; b) Pelayanan konsultasi bidang perpajakan, tabungan pensiun (taspen), BPJS Kesehatan/ketenagakerjaan, dan perbankan; dan c) Pelayanan evaluasi APBD dan pembinaan pengelolaan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Di bidang pelayanan administrasi barang milik daerah, BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah memberikan pelayanan pada proses pengamanan BMD melalui sertifikasi, pemagaran, pemberian patok batas dan label serta mekanisme pemindahtanganan dan penghapusan BMD. Selain itu, terkait pelaksanaan penyelenggaraan haji di Jawa Tengah, BPKAD mempunyai peranan untuk memberikan pelayanan, khususnya penyediaan tempat (embarkasi) sebagai sarana pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji.

Dalam rangka pelaksanaan administrasi keuangan dan BMD tersebut di atas, terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Dinamika regulasi bidang pengelolaan keuangan yang berpengaruh terhadap pemahaman SDM, khususnya pelayanan administrasi keuangan yang meliputi aspek perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
2. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang kurang optimal, antara lain: kurangnya pemahaman pengelola/pengurus BMD dalam menginventarisasi BMD yang berakibat pada data BMD yang tidak komprehensif dan masih adanya laporan BMD yang dikuasai oleh pihak lain tanpa izin pengguna/pengelola BMD.
3. Peningkatan sarana penunjang penyelenggaraan haji di Jawa Tengah melalui peningkatan kapasitas Gedung penginapan dan fasilitas transit (embarkasi) pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji.

Berkenaan dengan isu dinamika regulasi bidang Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut berdampak pada ketidaksesuaian dokumen penganggaran/APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian produk hukum daerah terkait pengelolaan keuangan daerah mengacu pada regulasi terbaru dan pemutakhiran sistem informasi keuangan daerah serta melaksanakan langkah koordinasi dan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Pada bidang layanan administrasi BMD, dampak yang muncul antara lain: 1) Pemanfaatan BMD yang tidak maksimal; 2) Masih adanya laporan BMD yang dikuasai oleh pihak lain tanpa izin pengguna/pengelola BMD yang berakibat pada konflik sengketa terhadap pihak lain dan lepasnya penguasaan/kepemilikan BMD; dan 3) Laporan BMD yang tidak valid yang berpotensi terhadap hasil opini/tanggapan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tantangan yang dihadapi BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kinerja pelayanan, antara lain:

1. Peningkatan pelayanan administrasi keuangan yang membutuhkan langkah percepatan, dan mengedepankan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui kebijakan *cashless* dan *paperless* yang

masih dilaksanakan secara bertahap yang harus didukung dengan pengintegrasian sistem informasi;

2. Kebijakan penyetaraan fasilitas pelayanan haji pada Asrama Donohudan setingkat hotel, masih terkendala perencanaan sarana dan prasarana serta dukungan pendanaan;
3. Optimalisasi Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam bidang urusan keuangan Daerah
4. Penyelesaian Kebijakan Pengalihan Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen (P3D) antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum 100%; dan
5. Pemetaan dan Visualisasi Data Informasi Barang Milik Daerah pada SIM Aset secara komprehensif.

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan urusan Keuangan dan Aset Daerah pada 2 (dua) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
2. Semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga cukup membantu dalam pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah.
3. Adanya dinamika regulasi kebijakan Pemerintah dalam Eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang mendorong penerapan pelaksanaan kebijakan *paperless* dan *cashless*.

Mengacu pada isu, permasalahan, tantangan, dan peluang yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan Langkah-langkah strategis antara lain:

1. Melakukan penyesuaian produk hukum daerah terkait pengelolaan keuangan daerah dan percepatan koordinasi/pembinaan kepada seluruh perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten/Kota; dan
2. Peningkatan sarana prasarana penunjang pelayanan administrasi keuangan dan BMD, termasuk di dalamnya fasilitas penyelenggaraan haji Asrama Donohudan.

#### 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu atas Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan BPKAD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024  
Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan</b>				<b>10.086.573.658.000</b>	<b>Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan</b>				<b>10.195.722.655.000</b>
<b>A</b>	<b>Bidang Keuangan</b>					<b>Bidang Keuangan</b>				
I	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	100%	10.018.463.658.000	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	100%	10.129.884.699.000
			Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu	100%	629.520.000			Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu	100%	710.450.000

			Persentase penetapan APBD tepat waktu	100%	11.684.271.000			Persentase penetapan APBD tepat waktu	100%	9.184.800.000
			Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	100%	5.293.580.000			Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	100%	3.925.303.000
			Persentase penyusunan dokumen manajemen kas	100%	3.560.855.000			Persentase penyusunan dokumen manajemen kas	100%	2.800.098.000
II	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi	100%	1.794.994.000	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi	100%	1.854.994.000

			Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik	84,02%	1.775.000.000			Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik	84,02%	1.456.439.000
			Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMMD) tepat waktu	100%	4.146.002.000			Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMMD) tepat waktu	100%	2.803.000.000 B
<b>B</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>NON URUSAN</b>				
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	BPKAD	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	34.412.380.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	BPKAD	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	37.852.286.000 S
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (AHD)	100%	4.532.918.000			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (AHD)	100%	4.950.591.000

			Indeks Manajemen Risiko	1,28	280.480.000			Indeks Manajemen Risiko	1,28	299.995.000	
Total Keseluruhan					10.086.573.658.000	Total Keseluruhan					10.195.722.655.000

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/ kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada BPKAD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024  
Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN Keuangan					
USULAN NIHIL					

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2024, mengacu kepada permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah, hasil evaluasi kinerja RKPD 2022, prioritas nasional dalam rancangan awal RKPD 2024. Pemerintah melalui Rancangan Awal RKP Tahun 2024 telah mengusung tema "Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas". Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 diprioritaskan pada upaya untuk:

- 1) meningkatkan perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;
- 2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
- 3) meningkatkan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- 4) mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang dinamis.

Pemerintah Jawa Tengah telah menetapkan dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 sebagai target dan sasaran pembangunan tahun 2024 yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dalam pencapaian target dan sasaran pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut:

- 1) PDRB per kapita sebesar 40,93 juta rupiah;
- 2) Angka Kemiskinan antara 9,06 - 8,96 persen;
- 3) Rasio Gini sebesar 0,364 persen;
- 4) Pertumbuhan Ekonomi antara 4,70 - 5,50 persen;
- 5) Inflasi pada angka 3,0 + 1 persen;
- 6) Tingkat Pengangguran Terbuka 5,44 - 4,94 persen;
- 7) Nilai Tukar Petani 107,45;
- 8) Indeks Pembangunan Manusia 73,43;
- 9) Indeks Pembangunan Kebudayaan 57,56;
- 10) Indeks Pembangunan Gender 92,68;
- 11) Indeks Pembangunan Keluarga 58,20;
- 12) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 66,28;

13) Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana 4%; dan

14) Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,00.

Dengan telah ditetapkannya target dan sasaran pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka BPKAD Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2024 akan lebih mengarahkan dalam sisi pengelolaan keuangan daerah untuk dapat melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pengelolaan barang milik daerah agar dapat dikelola dengan lebih tertib dalam menunjang tugas dan fungsi pada SKPD Pemerintah Jawa Tengah.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sehubungan dengan tujuan dan sasaran pada Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah beserta indikatornya yang digunakan dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	%	97,75
		Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	%	100
			Persentase Realisasi APBD	%	93,25
			Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	%	100

2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		76
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko		2,60
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat		81
3	Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah		Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	%	84,02
		Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan	%	100

### 3.3. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renja PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut.

Tabel 3.2

## Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/SasaranPD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Keselaran antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	Penetapan APBD terlambat	5	1. Dinamika Regulasi Pusat dan/atau Daerah 2. Politik dan Kondusivitas Daerah 3. Kompetensi SDM yang tidak sesuai	Pelaksanaan Program Kegiatan Terlambat			
Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase Realisasi APBD	Serapan belanja rendah	12	1. terbatasnya jumlah SDM yang kompeten 2. Realisasi pengajuan SP2D tidak sesuai Surat Penyediaan Dana (SPD)	1. Program kegiatan terhambat 2. Program kegiatan belum terlaksana secara optimal 3. Nilai IPKD rendah	Berkoordinasi dengan Bapenda Prov Jateng selaku koordinator pendapatan daerah guna memastikan kapasitas fiskal daerah dalam mempersiapkan Manajemen Kas yang lebih komprehensif.	Kepala BPKAD	akhir tahun 2025
Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	Keterlambatan penyampaian laporan pertanggung	4	1) Dinamika Regulasi Pemerintah Pusat dan Provinsi	tidak tersajikannya LKPD sesuai standar			

		jawaban yang disusun		2) Kompetensi dan kuantitas SDM yang kurang memadai				
Meningkatkannya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Penyampaian RKBMD/RKPBMMD Tepat Waktu	Penyampaian RKBMD/RKPBMMD tidak tepat waktu	4	Pengelolaan BMD belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Penyusunan dokumen penganggaran tidak sesuai dengan dokumen RKBMD			
Meningkatkannya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Penyelesaian tindak lanjut temuan BPK terkait BMD	Data dalam SIM Aset Jateng kurang informatif	8	1. Kurangnya pemahaman pengurus barang dalam penyusunan laporan BMD 2. Kurang lengkapnya dokumen/riwayat kepemilikan Barang Milik Daerah	1. Penyajian Neraca BMD menjadi kurang komprehensif 2. Pemerintah Prov. Jateng kalah dalam sengketa aset			
Meningkatkannya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase BMD dilakukan pengamanan fisik dan hukum/sertifikat (Fisik)	Masih adanya Laporan Aset/BMD yang dikuasai oleh pihak lain tanpa ijin pada SKPD (Aset pengguna)	12	1. Rentang kendali yang terlalu jauh dikarenakan lokasi aset tersebar di 35 Kabupaten/Kota 2. Kompetensi dan kuantitas SDM yang kurang memadai	Konflik/sengketa serta penguasaan BMD oleh pihak lain	Penyusunan Dokumen Analisa dan Rencana Tindak dalam rangka Pemanfaatan BMD	Kepala BPKAD	Akhir 2025



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024**

Pada Tahun Anggaran 2024, BPKAD Provinsi Jawa Tengah menjalankan 3 (tiga) Program, yang meliputi :

##### **1. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Program Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024 ini merupakan program yang dilaksanakan oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam mengawal aktivitas pengelolaan keuangan daerah provinsi, yang meliputi :

- a. Proses atau tahapan penyusunan dokumen APBD Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 dan APBD Induk Tahun Anggaran 2025, melalui kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
- b. Koordinasi pelaksanaan proses akuntansi dan pelaporan keuangan pada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, termasuk penyusunan APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Aktivitas ini dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- c. Koordinasi pelaksanaan penatausahaan keuangan pada seluruh perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, termasuk didalamnya koordinasi dengan para stakeholder terkait seperti Perbankan, TASPEN, BPJS dan pelaporan pajak di Kantor Pajak. Aktivitas ini dilaksanakan melalui (1) kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dan (2) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah;
- d. Melaksanakan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah, meliputi dokumen Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Perubahan APBD Tahun 2024 dan APBD Induk Tahun 2025. Selain itu termasuk juga aktivitas pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan di Kabupaten/Kota. Berbagai aktivitas ini ditunjang melalui kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. Penatausahaan dana transfer ke Provinsi lainnya dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah berupa Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Provinsi Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024. Aktivitas ini dilaksanakan melalui Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

## 2. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2024 ini, merupakan program yang dilaksanakan oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam mengawal aktivitas pengelolaan aset daerah di seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kaitannya sebagai “Pengelola Barang Milik Daerah”. Adapun aktivitasnya meliputi Perencanaan, Pemeliharaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengamanan dan Pemberdayaan Barang Milik Daerah melalui Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## 3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2024 ini, merupakan program yang dilaksanakan BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam mengakomodir semua kebutuhan pelaksanaan pekerjaan Birokrasi baik pada Kantor BPKAD maupun pada Unit Pengelola Asrama Donohudan. Program ini merupakan aktivitas “belanja yang bersifat mengikat” yang dibutuhkan oleh perangkat daerah untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan birokrasi selama 12 (dua belas) bulan, seperti Belanja Gaji dan Tunjangan, langganan listrik, air, internet dan telepon, sarana peralatan dan perlengkapan Gedung kantor, biaya pemeliharaan kendaraan operasional dan Gedung kantor, serta biaya logistik/makan minum pegawai.

Adapun pembiayaan aktivitas tersebut, dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan, meliputi :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, rencana program dan kegiatan pembangunan BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam menunjang prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 dituangkan sebagaimana tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		(15)	(16)
												2024			
												Target	Rp		
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah													43.102.872.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah										%	76		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah											42.802.877.000		
			Indeks Kepuasan Masyarakat								Angka	81	42.802.877.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								42.802.877.000		

						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah				%	100	37.852.286.000	SEKRETARIAT	
				X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						32.618.710.000		
							Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun			Dokumen	1	32.618.710.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				X.XX.01.1.02.0001				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				29.407.029.000		
									Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	320	29.407.029.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.02.0002				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.082.601.000		
									Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	3.082.601.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.02.0005				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				40.000.000		
									Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	40.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

				X.XX.01.1.02.0007					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				89.080.000		
										Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	4	89.080.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							-	
							Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan				%	100	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.05.0009					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					-	
										Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	0	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.560.000.000		
							Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang				%	100	1.560.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	



									Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	510.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.0011					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			100.000.000		
									Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	5	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang					-		
							Urusan Pemerintah Daerah							
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		Unit	521	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.07.0005					Pengadaan Mebel			-		
									Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.0006					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		
									Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

				X.XX.01.1.07.0010					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-		
										Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.161.220.000			
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun			Laporan	4	2.161.220.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000			
										Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	10.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				394.400.000			
										Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	394.400.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.0003					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				101.000.000			
										Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	101.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

				X.XX.01.1.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.655.820.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1.655.820.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.512.356.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	326	1.512.356.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.09.0001					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				517.356.000		
										Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	66	517.356.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.0005					Pemeliharaan Mebel				-		
										Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				108.000.000		

									Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	200	108.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			887.000.000		
									Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	887.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah				%	100	4.950.591.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah					700.000.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan		%	100	700.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
				X.XX.01.1.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			100.000.000		
									Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	100.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.0003					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			400.000.000		

									Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	35000	400.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.0008					Fasilitas Kunjungan Tamu			49.950.000		
									Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan	1	49.950.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			150.050.000		
									Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	150.050.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.231.949.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun		Laporan	1	2.231.949.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
				X.XX.01.1.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.200.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1.200.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			189.066.000		

									Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	189.066.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.041.683.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	2.041.683.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.018.642.000		
							Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	730	2.018.642.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
				X.XX.01.1.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			130.000.000		
									Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	15	130.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.0005					Pemeliharaan Mebel			70.000.000		
									Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	350	70.000.000	Unit Pengelolaan Asrama	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

														Donohudan Kelas B	
				X.XX.01.1.09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				630.442.000		
										Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	350	630.442.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.0011					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.188.200.000		
										Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	15	1.188.200.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah											299.995.000		
			Indeks Manajemen Risiko								Angka	2,6	299.995.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								299.995.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah					%	100	299.995.000	SEKRETARIAT	

				X.XX.01.1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						299.995.000		
							Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan			%	100		299.995.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
				X.XX.01.1.01.0001				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					149.200.000		
									Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	8		149.200.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.01.0007				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					150.795.000		
									Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	1		150.795.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
<b>Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>													<b>10.146.505.350.000</b>	<b>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</b>	
	Persentase kualitas pengelolaan keuangan daerah									%	97,75			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	



				5.02.02.1.05.0009					Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				25.000.000.000		
										Tersusunnya laporan Dana Darurat dan Mendesak	Dokumen	1	25.000.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.05.0010					Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi				7.105.634.568.000		
										Tersusunnya laporan Dana bagi Hasil Provinsi	Dokumen	1	7.105.634.568.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu					%	100	710.450.000	SEKRETARIAT	
				5.02.02.1.02			Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota						710.450.000		
								Tersusunnya Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/ Kota			Dokumen	105	710.450.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
				5.02.02.1.02.0002					Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				102.000.000		

										Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	35	102.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.02.0003						Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			218.900.000		
										Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	35	218.900.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.02.0004						Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			218.900.000		

										Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	35	218.900.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.02.0005					Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota				59.050.000		
										Terlaksananya Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	59.050.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.02.0012					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				111.600.000		
										Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	111.600.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penetapan APBD tepat waktu					%	100	9.184.800.000	Bidang Anggaran	
				5.02.02.1.01			Koordinasi dan Penyusunan						9.184.800.000		



										Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Dokumen	2	160.000.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.01.0008						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			2.627.389.000		
										Tersusunnya dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.	Dokumen	2	2.627.389.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
									Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Kabupaten/ Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan.		Dokumen	35	1.512.741.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	
				5.02.02.1.01.0009						Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			1.512.741.000		
										Tersusunnya dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	35	1.512.741.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
			Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun								%	100	3.925.303.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

				5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								3.925.303.000		
						Persentase penyampaian LKPD tepat waktu					%	100	3.925.303.000	Bidang Akuntansi	
				5.02.02.1.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						3.925.303.000		
								Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan yang disusun			Dokumen	1	983.373.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
				5.02.02.1.04.0002				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban					400.000.000		
											Laporan	1	400.000.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.04.0011				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi					583.373.000		

									Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	41	583.373.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
								Tersusunnya Dokumen laporan Keuangan Pengeluaran Yang Disusun		Dokumen	1	568.350.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	
				5.02.02.1.04.0008				Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				220.000.000		
									Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	220.000.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.04.0009				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				348.350.000		
									Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	348.350.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
								Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Yang Disusun		Dokumen	1	2.373.580.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	
				5.02.02.1.04.0004				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				573.580.000		

									Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	1	573.580.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.04.0005					Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi			1.800.000.000		
									Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	1	1.800.000.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
			Persentase realisasi APBD							%	93,25	2.800.098.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
				5.02.02	PROGRAM PENGELOLAN KEUANGAN DAERAH							2.800.098.000		
						Persentase penyusunan dokumen manajemen kas				%	100	2.800.098.000	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
				5.02.02.1.03			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					2.270.792.000		

								Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan			Dokumen	2	747.310.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
				5.02.02.1.03.0006				Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank					747.310.000		
										Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	43	747.310.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.03.0010				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan					-		
										Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	0	-	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

								Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Pemerintahan, Pendidikan Dan Kesra		Dokumen	1	763.271.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA	
				5.02.02.1.03.0003				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				763.271.000		
									Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	4	763.271.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.03.0011				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				-		
									Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	0	-	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
								Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas yang disusun		Dokumen	1	760.211.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	
				5.02.02.1.03.0001				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				-		
									Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	0	-	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

				5.02.02.1.03.0009					Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait				760.211.000		
										Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	49	760.211.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.06			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah						529.306.000		
								Tersusunnya Dokumen Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan			Dokumen	2	529.306.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	
				5.02.02.1.06.0002					Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				529.306.000		

										Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1	529.306.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.06.0003						Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi			-		
										Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	0	-	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
<b>Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah</b>													<b>6.114.433.000</b>	<b>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</b>	
	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)										%	84,02		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		<b>Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</b>											<b>6.114.433.000</b>		
			Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai								%	100	6.114.433.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

			peraturan perundang-undangan												
				5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							6.114.433.000			
						Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi				%	100	1.854.994.000	Bidang Aset Daerah		
				5.02.03.1.01			Pengelolaan Barang Milik Daerah					1.854.994.000			
								Meningkatnya jumlah aset yang teramankan		Angka	70,76	1.704.994.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAAN ASET DAERAH		
				5.02.03.1.01.0007					Pengamanan Barang Milik Daerah			1.704.994.000			
										Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1.704.994.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
								Terfasilitasinya penyelesaian kasus/sengketa Aset Daerah		%	100	150.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAAN ASET DAERAH		

				5.02.03.1.01.0009					Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				150.000.000		
										Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	41	150.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAAN ASET DAERAH	
						Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik					%	84,02	1.456.439.000	Bidang Aset Daerah	
				5.02.03.1.01			Pengelolaan Barang Milik Daerah						1.456.439.000		
								Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu			Dokumen	1	1.456.439.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	
				5.02.03.1.01.0005					Penatausahaan Barang Milik Daerah				400.000.000		
										Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	2	400.000.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				5.02.03.1.01.0006					Inventarisasi Barang Milik Daerah				567.790.000		
										Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan	41	567.790.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA

														PENGGUNAAN ASET DAERAH	SEMARA NG	
				5.02.03.1.01. 0011					Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					-		
									Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Lapora n	0		-	SUB BIDANG PENATAUSAH AAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARA NG	
				5.02.03.1.01. 0012					Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				488.649.000			
									Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Lapora n	84		488.649.000	SUB BIDANG PENATAUSAH AAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARA NG	
						Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/ren cana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBM) tepat waktu				%	100		2.803.000.000	Bidang Aset Daerah		
				5.02.03.1.01			Pengelolaan Barang Milik Daerah							2.803.000.000		

								Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan		%	100	2.803.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
				5.02.03.1.01.0003				Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				724.000.000		
									Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	724.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.03.1.01.0004				Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				414.000.000		
									Tersedianya Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	414.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				5.02.03.1.01.0008				Penilaian Barang Milik Daerah				220.000.000		
									Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1	220.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

				5.02.03.1.01.0010					Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1.445.000.000		
									Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	3		1.445.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
<b>JUMLAH</b>													<b>10.195.722.655.000</b>		

#### 4.2. Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Pengelolaan Keuangan Daerah								
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Penetapan APBD terlambat	5	1. Dinamika Regulasi Pusat dan/atau Daerah 2. Politik dan Kondusivitas Daerah 3. Kompetensi SDM yang tidak sesuai	Pelaksanaan Program Kegiatan Terlambat			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas	Serapan belanja rendah	12	1. terbatasnya jumlah SDM yang kompeten 2. Realisasi pengajuan SP2D tidak sesuai Surat Penyediaan Dana (SPD)	1. Program kegiatan terhambat 2. Program kegiatan belum terlaksana secara optimal 3. Nilai IPKD rendah	Berkoordinasi dengan Bapenda Prov Jateng selaku koordinator pendapatan daerah guna memastikan kapasitas fiskal daerah dalam mempersiapkan Manajemen Kas yang lebih komprehensif.	Kepala BPKAD	akhir tahun 2025
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen laporan Keuangan Pengeluaran Yang Disusun	Keterlambatan penyampaian laporan pertanggung jawaban yang disusun	4	1) Dinamika Regulasi Pemerintah Pusat dan Provinsi 2) Kompetensi dan kuantitas SDM yang kurang memadai	tidak tersajikannya LKPD sesuai standar			
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah								
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan	Penyampaian RKBMD/RKPBMD tidak tepat waktu	4	Pengelolaan BMD belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Penyusunan dokumen penganggaran tidak sesuai dengan dokumen RKBMD			

Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu	Data dalam SIM Aset Jateng kurang informatif	8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pemahaman pengurus barang dalam penyusunan laporan BMD</li> <li>2. Kurang lengkapnya dokumen/riwayat kepemilikan Barang Milik Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyajian Neraca BMD menjadi kurang komprehensif</li> <li>2. Pemerintah Prov. Jateng kalah dalam sengketa aset</li> </ol>			
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya jumlah aset yang teramankan	Masih adanya Laporan Aset/BMD yang dikuasai oleh pihak lain tanpa izin pada SKPD (Aset pengguna)	12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rentang kendali yang terlalu jauh dikarenakan lokasi aset tersebar di 35 Kabupaten/Kota</li> <li>2. Kompetensi dan kuantitas SDM yang kurang memadai</li> </ol>	Konflik/sengketa serta penguasaan BMD oleh pihak lain	Penyusunan Dokumen Analisa dan Rencana Tindak dalam rangka Pemanfaatan BMD	Kepala BPKAD	Akhir 2025

## BAB V

### PENUTUP

Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan yang teridentifikasi kedalam rencana target kinerja dan pendanaan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan tahun 2024. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Menyusun perencanaan secara cermat sesuai kebutuhan dengan tetap mempertimbangkan risiko pengalihan anggaran untuk kebutuhan yang lebih mendesak;
2. Melaksanakan seluruh rencana program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhitungkan secara cermat capaian target kinerja yang telah ditetapkan;
3. Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap capaian target kinerja dari program/kegiatan yang telah ditetapkan disertai pendampingan sebagai langkah tindak lanjut atas kinerja yang belum mencapai target.

Dalam rangka mengantisipasi ketidaksesuaian antara rencana dan capaian target kinerja maka perlu ditetapkan langkah-langkah tindak lanjut pada Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi program/kegiatan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan apabila terjadi kebijakan *refocusing* anggaran;
2. Melakukan penyesuaian kebutuhan anggaran sebagai tindak lanjut dinamika regulasi khususnya bidang keuangan dan aset daerah;
3. Melakukan sosialisasi terkait pemahaman regulasi mengenai keuangan dan aset daerah.

Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 ini tentu saja masih dirasakan perlu adanya perbaikan dari segi kualitas perencanaan program/kegiatan, agar dalam implementasinya dapat diterapkan dengan tetap mempertimbangkan kondisi aparatur, dukungan pendanaan, dan komitmen seluruh elemen pendukung organisasi guna mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2024.

**LAMPIRAN**  
**Manajemen Risiko Perangkat Daerah**

**Tabel 1**  
**Identifikasi Risiko**

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Strategis	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Keselarasn antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	Penetapan APBD terlambat	Risiko Kebijakan	1. Dinamika Regulasi Pusat dan/atau Daerah 2. Politik dan Kondusivitas Daerah 3. Kompetensi SDM yang tidak sesuai	Pelaksanaan Program Kegiatan Terlambat	Seluruh SKPD dan Masyarakat
2	Sasaran Strategis	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase Realisasi APBD	Serapan belanja rendah	Risiko Operasional	1. terbatasnya jumlah SDM yang kompeten 2. Realisasi pengajuan SP2D tidak sesuai Surat Penyediaan Dana (SPD)	1. Program kegiatan terhambat 2. Program kegiatan belum terlaksana secara optimal 3. Nilai IPKD rendah	Seluruh SKPD dan Masyarakat

3	Sasaran Strategis	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	Keterlambatan penyampaian laporan pertanggung jawaban yang disusun	Risiko Kebijakan	1) Dinamika Regulasi Pemerintah Pusat dan Provinsi 2) Kompetensi dan kuantitas SDM yang kurang memadai	tidak tersajikannya LKPD sesuai standar	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
4	Sasaran Strategis	Meningkatkannya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Penyampaian RKBMD/RKPBMD Tepat Waktu	Penyampaian RKBMD/RKPBMD tidak tepat waktu	Risiko Kebijakan	Pengelolaan BMD belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Penyusunan dokumen penganggaran tidak sesuai dengan dokumen RKBMD	Seluruh SKPD
5	Sasaran Strategis	Meningkatkannya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Penyelesaian tindak lanjut temuan BPK terkait BMD	Data dalam SIM Aset Jateng kurang informatif	Risiko Operasional	1. Kurangnya pemahaman pengurus barang dalam penyusunan laporan BMD 2. Kurang lengkapnya dokumen/riwayat kepemilikan Barang Milik Daerah	1. Penyajian Neraca BMD menjadi kurang komprehensif 2. Pemerintah Prov. Jateng kalah dalam sengketa aset	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
6	Sasaran Strategis	Meningkatkannya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase BMD dilakukan pengamanan fisik dan hukum/sertifikat (Fisik)	Masih adanya Laporan Aset/BMD yang dikuasai oleh pihak lain tanpa ijin pada SKPD (Aset pengguna)	Risiko Operasional	1. Rentang kendali yang terlalu jauh dikarenakan lokasi aset tersebar di 35 Kabupaten/Kota 2. Kompetensi dan kuantitas SDM yang kurang memadai	Konflik/sengketa serta penguasaan BMD oleh pihak lain	Seluruh SKPD

**Tabel 2**  
**Analisis Risiko**

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Penetapan APBD terlambat	2	5	10	Ada	koordinasi antara para pihak berkepentingan (Pemerintah Pusat, Provinsi dan DPRD)	Memadai	1	5	5
Serapan belanja rendah	3	4	12	Ada	Manajemen Kas terkait Belanja Daerah	Belum memadai	3	4	12
Keterlambatan penyampaian laporan pertanggung jawaban yang disusun	2	4	8	Ada	Pendampingan PD	Memadai	1	4	4
Penyampaian RKBMD/RKPBMD tidak tepat waktu	2	4	8	Ada	Rekonsiliasi Penyusunan RKBMD	Memadai	1	4	4
Data dalam SIM Aset Jateng kurang informatif	3	4	12	Ada	Pendampingan PD	Memadai	2	4	8
Masih adanya Laporan Aset/BMD yang dikuasai oleh pihak lain tanpa ijin pada SKPD (Aset pengguna)	3	4	12	Ada	Koordinasi dengan SKPD terkait pengamanan BMD	Belum Memadai	3	4	12

**Tabel 3**  
**Risiko Prioritas**

<b>Risiko Prioritas</b>	<b>Skala Risiko</b>	<b>Pemilik Risiko</b>	<b>Sebab</b>	<b>Dampak</b>
1	2	3	4	5
Penetapan APBD terlambat	5	Kepala BPKAD	1. Dinamika Regulasi Pusat dan/atau Daerah 2. Politik dan Kondusivitas Daerah 3. Kompetensi SDM yang tidak sesuai	Pelaksanaan Program Kegiatan Terlambat
Serapan belanja rendah	12	Kepala BPKAD	1. terbatasnya jumlah SDM yang kompeten 2. Realisasi pengajuan SP2D tidak sesuai Surat Penyediaan Dana (SPD)	1. Program kegiatan terhambat 2. Program kegiatan belum terlaksana secara optimal 3. Nilai IPKD rendah
Keterlambatan penyampaian laporan pertanggung jawaban yang disusun	4	Kepala BPKAD	1) Dinamika Regulasi Pemerintah Pusat dan Provinsi 2) Kompetensi dan kuantitas SDM yang kurang memadai	tidak tersajikannya LKPD sesuai standar
Penyampaian RKBMD/RKPBMMD tidak tepat waktu	4	Kepala BPKAD	Pengelolaan BMD belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Penyusunan dokumen penganggaran tidak sesuai dengan dokumen RKBMD
Data dalam SIM Aset Jateng kurang informatif	8	Kepala BPKAD	1. Kurangnya pemahaman pengurus barang dalam penyusunan laporan BMD 2. Kurang lengkapnya dokumen/riwayat kepemilikan Barang Milik Daerah	1. Penyajian Neraca BMD menjadi kurang komprehensif 2. Pemerintah Prov. Jateng kalah dalam sengketa aset
Masih adanya Laporan Aset/BMD yang dikuasai oleh pihak lain tanpa ijin pada SKPD (Aset pengguna)	12	Kepala BPKAD	1. Rentang kendali yang terlalu jauh dikarenakan lokasi aset tersebar di 35 Kabupaten/Kota 2. Kompetensi dan kuantitas SDM yang kurang memadai	Konflik/sengketa serta penguasaan BMD oleh pihak lain

**Tabel 4**  
**Rencana Tindak Pengendalian**

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase Realisasi APBD	Serapan belanja rendah	12	1. terbatasnya jumlah SDM yang kompeten 2. Realisasi pengajuan SP2D tidak sesuai Surat Penyediaan Dana (SPD)	1. Program kegiatan terhambat 2. Program kegiatan belum terlaksana secara optimal 3. Nilai IPKD rendah	Berkoordinasi dengan Bapenda Prov Jateng selaku koordinator pendapatan daerah guna memastikan kapasitas fiskal daerah dalam mempersiapkan Manajemen Kas yang lebih komprehensif.	Kepala BPKAD	akhir tahun 2025
Meningkatkannya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase BMD dilakukan pengamanan fisik dan hukum/sertifikat (Fisik)	Masih adanya Laporan Aset/BMD yang dikuasai oleh pihak lain tanpa izin pada SKPD (Aset pengguna)	12	1. Rentang kendali yang terlalu jauh dikarenakan lokasi aset tersebar di 35 Kabupaten/Kota 2. Kompetensi dan kuantitas SDM yang kurang memadai	Konflik/sengketa serta penguasaan BMD oleh pihak lain	Penyusunan Dokumen Analisa dan Rencana Tindak dalam rangka Pemanfaatan BMD	Kepala BPKAD	akhir 2025

